



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/130/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/66/2015 TENTANG ALOKASI ANGGARAN
DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan otonomi daerah secara nyata di Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu adanya dukungan dana pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan dalam penyelenggaraan program pembangunan kesehatan;
- b. bahwa Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/66/2015, perlu diubah karena masih adanya dana tugas pembantuan yang belum terdistribusikan untuk program Bina Upaya Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/66/2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1511);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 02.02/Menkes/66/2015 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.02.02/MENKES/66/2015 TENTANG ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Mengubah Ketentuan Lampiran I angka III dan Lampiran III angka II huruf A, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/66/2015, menjadi sebagai berikut:



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

1. LAMPIRAN I

III. PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Rp. 3.401.459.142.000,-

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di daerah tahun 2015 disediakan dana dekonsentrasi di daerah sebesar Rp.141.490.447.000,- dan dana tugas pembantuan bersumber dari APBN sebesar **Rp.1.230.678.695.000,-** dan bersumber APBN Perubahan sebesar Rp.2.029.290.000.000.

Dana dekonsentrasi ini dialokasikan untuk mencapai sasaran Program Pembinaan Upaya Kesehatan, yang dapat digunakan dalam rangka sinergisme dan koordinasi bagi kesinambungan program antara pusat dengan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit/laboratorium kesehatan di daerah, dengan memperhatikan menu dana Dekonsentrasi Tahun 2015.

1. Kegiatan Dukungan Manajemen Program Bina Upaya Kesehatan (BUK)
 - a. Pertemuan konsultasi perencanaan dan monitoring evaluasi program BUK antara Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dengan dinas kesehatan provinsi.
 - b. Pertemuan penyusunan laporan Barang Milik Negara (BMN) tingkat provinsi dengan satker kabupaten/kota penerima APBN.
 - c. Pertemuan SAI (SAK dan SIMAK-BMN) Program BUK antara dinas kesehatan provinsi dengan satker di kabupaten/kota penerima APBN
 - d. Monitoring evaluasi dan bimbingan teknis oleh Dinkes Provinsi ke satker kabupaten/kota penerima anggaran APBN.
 - e. Pertemuan pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit
 - f. Pertemuan Penyusunan *e-planning* program BUK oleh Dinkes Provinsi kepada Dinkes kabupaten/kota, rumah sakit provinsi/kabupaten/kota dan sarkes lainnya di wilayah binaannya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Jiwa
 - a. Peningkatan keterampilan kesehatan jiwa bagi Petugas kesehatan di puskesmas
 - b. Peningkatan keterampilan asesmen dan rencana terapi terkait Wajib Lapori Pecandu Narkotika
 - c. Peningkatan kapasitas dukungan psikologi awal (PFA) bagi petugas siaga bencana di tingkat provinsi/kabupaten/kota
3. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Dasar
 - a. Peningkatan kemampuan teknis Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD).
 - b. Kegiatan tim pelayanan kesehatan bergerak dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan di Daerah tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).
 - c. *Workshop* penguatan pembinaan manajemen puskesmas di dinas kesehatan kabupaten/kota.
 - d. Pelaksanaan pelatihan calon pendamping akreditasi fasyankes primer.
 - e. *Workshop* penguatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
 - f. Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di fasilitas pelayanan kesehatan primer.
 - g. Peningkatan kemampuan teknis pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam mendukung MDG's.
4. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Rujukan
 - a. *Workshop* Standar Akreditasi Baru/versi 2012.
 - b. *Improvement Colaborative* PONED-PONEK.
 - c. Pengembangan Jejaring SPGDT-S *Call Center* 119
 - d. Pelatihan PPGD di Rumah Sakit
 - e. Pembentukan BPRS Provinsi.
 - f. Bimbingan Teknis Penyusunan SPM di Provinsi.
5. Kegiatan Pembinaan Keperawatan dan Keteknisian Medik
 - a. Puskesmas yang melaksanakan pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. Puskesmas dan Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan kebidanan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.

Anggaran Tugas Pembantuan Ditjen Bina Upaya Kesehatan bersumber dari APBN sebesar Rp.1.230.678.695.000,- dan bersumber APBN Perubahan sebesar Rp.2.029.290.000.000,- digunakan untuk kegiatan sebagai berikut;

A. Bersumber APBN

1. Menu Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - a. Pembangunan (pekerjaan konstruksi, perencana, pengawas, pengelola kegiatan) dan pengadaan peralatan rumah sakit Pratama dan rumah sakit bergerak;
 - b. Pengadaan sarana, prasarana dan peralatan penguatan rumah sakit rujukan nasional di RSUD Abdul Wahab Syahrani (provinsi Kalimantan Timur) dan RSUD Dok II Jayapura (Provinsi Papua);
 - c. Pengadaan sarana, prasarana dan peralatan penguatan rumah sakit daerah
 - d. Pengadaan ambulan untuk penguatan SPGDT rumah sakit Rujukan Nasional, rumah sakit rujukan provinsi dan rumah sakit rujukan regional.
2. Menu Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar
 - a. Pembangunan puskesmas bagi daerah pemekaran terutama di wilayah terpencil/sangat terpencil
 - b. Pembangunan rumah dinas dokter/tenaga kesehatan di wilayah terpencil/sangat terpencil
 - c. Peningkatan pustu menjadi puskesmas bagi daerah pemekaran terutama di wilayah terpencil/sangat terpencil
 - d. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap untuk daerah terpencil dan sangat terpencil
 - e. Peningkatan puskesmas rawat inap menjadi puskesmas mampu PONEC pada kabupaten MDG's dengan jarak lebih dari 2 jam
 - f. Rehabilitasi/renovasi Puskesmas rusak berat dan rusak sedang.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- g. Pengadaan Kendaraan
- Pusling *double* gardan bagi puskesmas dengan wilayah kerja luas dan medan jalan sulit
 - Ambulans untuk daerah rawan kecelakaan dan bencana
 - Pusling perairan bagi puskesmas dengan wilayah kerja yang sebagian besar hanya bias dijangkau transportasi air.
- h. Pengadaan alat kesehatan bagi puskesmas dengan alat kesehatan tidak lengkap dan tersedia tenaga yang berkompeten dan terlatih
- Set Pemeriksaan Umum
 - PONED Set
 - Set Tindakan Medis/Gawat darurat
 - Set Kesehatan Gigi dan Mulut
 - Laboratorium Set
 - Set Promosi Kesehatan
 - Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu, Anak KB dan Imunisasi
- i. Pengadaan alat penunjang untuk daerah terpencil/sangat terpencil dan tidak ada listrik
- *Sollar Cell*
 - Generator
 - Radio Komunikasi
- j. Khusus satker Dinkes Kabupaten. Halmahera Barat (provinsi Maluku Utara) digunakan untuk membayar hutang pengadaan peralatan kesehatan dan ambulans yang belum terbayarkan melalui TP APBN 2014. Pembayaran hutang baru dapat dilaksanakan setelah ada hasil audit BPKP. Selanjutnya sisa anggaran dari pembayaran hutang dapat digunakan sesuai dengan menu diatas.

B. Bersumber APBN Perubahan

Menu Tugas Pembantuan APBN-P untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagai berikut:



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. Pengadaan sarana prasarana dan peralatan penguatan rumah sakit rujukan nasional dan diutamakan untuk mendukung terwujudnya pelayanan unggulan subspesialis.
- b. Pengadaan sarana, prasarana dan peralatan penguatan rujukan regional dan provinsi sesuai usulan dengan prioritas penguatan pelayanan Instalasi Gawat darurat (IGD), Penguatan pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS) Pelayanan *Intensive Care Unit* (ICU), Penguatan Pelayanan *Intensive Care Unit* (ICCU), Penguatan Pelayanan Neonatal *Intensive Care Unit* (NICU), Penguatan Pelayanan *Pediatric Intensive Care Unit* (PICU) dan tempat tidur Klas III.
- c. Pengadaan ambulans untuk penguatan SPGDT rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan provinsi dan rumah sakit rujukan regional.

2. LAMPIRAN III

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

II. PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

a. BERSUMBER APBN

NO	PROVINSI KABUPATEN/KOTA	RM		ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN RUJUKAN	
1	2	3	4	5
I	ACEH	48,681,000,000	-	48,681,000,000
1	Dinkes Kab. Aceh Singkil	3,401,000,000	-	3,401,000,000
2	Dinkes Kab. Aceh Selatan	3,100,000,000	-	3,100,000,000
3	Dinkes Kab. Aceh Tenggara	2,250,000,000	-	2,250,000,000
4	Dinkes Kab. Aceh Timur	4,350,000,000	-	4,350,000,000
5	Dinkes Kab. Aceh Barat	4,100,000,000	-	4,100,000,000
6	Dinkes Kab. Aceh Besar	3,500,000,000	-	3,500,000,000
7	Dinkes Kab. Aceh Barat Daya	3,500,000,000	-	3,500,000,000
8	Dinkes Kab. Gayo Lues	4,000,000,000	-	4,000,000,000
9	Dinkes Kab. Aceh Tamiang	2,000,000,000	-	2,000,000,000
10	Dinkes Kab. Nagan Raya	3,950,000,000	-	3,950,000,000
11	Dinkes Kab. Aceh Jaya	2,700,000,000	-	2,700,000,000
12	Dinkes Kab. Bener Meriah	4,000,000,000	-	4,000,000,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	PROVINSI KABUPATEN/KOTA	RM		ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN RUJUKAN	
1	2	3	4	5
13	Dinkes Kab. Pidie Jaya	4,350,000,000	-	4,350,000,000
14	Dinkes Kota Banda Aceh	3,480,000,000	-	3,480,000,000
15	Dinkes Kab. Pidie	10,000,000,000	-	10,000,000,000
II	SUMATERA UTARA	7,580,588,000	-	7,580,588,000
1	Dinkes Kab. Karo	3,000,000,000	-	3,000,000,000
2	Dinkes Kab. Pakpak Barat	1,291,000,000	-	1,291,000,000
3	Dinkes Kota Sibolga	3,289,588,000	-	3,289,588,000
III	SUMATERA BARAT	35,382,900,000	-	35,382,900,000
1	Dinkes Kab. Kepulauan Mentawai	3,200,000,000	-	3,200,000,000
2	Dinkes Kab. Pesisir Selatan	3,450,000,000	-	3,450,000,000
3	Dinkes Kab. Solok	4,500,000,000	-	4,500,000,000
4	Dinkes Kab. Sijunjung	3,450,000,000	-	3,450,000,000
5	Dinkes Kab. Padang Pariaman	4,460,000,000	-	4,460,000,000
6	Dinkes Kab. Solok Selatan	3,400,000,000	-	3,400,000,000
7	Dinkes Kab. Dharmas Raya	3,000,000,000	-	3,000,000,000
8	Dinkes Kab. Pasaman Barat	3,600,000,000	-	3,600,000,000
9	Dinkes Kota Padang	3,800,000,000	-	3,800,000,000
10	Dinkes Kota Sawah Lunto	2,522,900,000	-	2,522,900,000
11	RSUD Arosuka Solok	-	5,000,000,000	5,000,000,000
IV	RIAU	9,961,482,000	-	9,961,482,000
1	Dinkes Kab. Bengkalis	1,600,000,000	-	1,600,000,000
2	Dinkes Kab. Rokan Hilir	3,911,482,000	-	3,911,482,000
3	Dinkes Kab. Kepulauan Meranti	4,450,000,000	-	4,450,000,000
V	JAMBI	3,400,000,000	-	3,400,000,000
1	Dinkes Kab. Tanjung Jabung Timur	3,400,000,000	-	3,400,000,000
VI	SUMATERA SELATAN	22,050,000,000	21,531,198,000	43,581,198,000
1	Dinkes Kab. Ogan Komering Ulu	3,000,000,000	-	3,000,000,000
2	Dinkes Kab. Ogan Komering Ilir	2,500,000,000	21,531,198,000	24,031,198,000
3	Dinkes Kab. Muara Enim	2,500,000,000	-	2,500,000,000
4	Dinkes Kab. Lahat	2,500,000,000	-	2,500,000,000
5	Dinkes Kab. Banyu Asin	4,400,000,000	-	4,400,000,000
6	Dinkes Kab. Ogan Ilir	4,150,000,000	-	4,150,000,000
7	Dinkes Kab. Empat Lawang	3,000,000,000	-	3,000,000,000
VII	BENGGULU	26,320,000,000	-	26,320,000,000
1	Dinkes Kab. Bengkulu Selatan	4,750,000,000	-	4,750,000,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	PROVINSI KABUPATEN/KOTA	RM		ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN RUJUKAN	
1	2	3	4	5
2	Dinkes Kab. Bengkulu Utara	4,750,000,000	-	4,750,000,000
3	Dinkes Kab. Seluma	3,960,000,000	-	3,960,000,000
4	Dinkes Kab. Mukomuko	4,760,000,000	-	4,760,000,000
5	Dinkes Kab. Lebong	4,500,000,000	-	4,500,000,000
6	Dinkes Kab. Bengkulu Tengah	3,600,000,000	-	3,600,000,000
VIII	LAMPUNG	5,724,480,000	-	5,724,480,000
1	Dinkes Kab. Lampung Utara	1,974,480,000	-	1,974,480,000
2	Dinkes Kab. Pesawaran	3,750,000,000	-	3,750,000,000
3	RSUD Kota Agung	-	5,000,000,000	5,000,000,000
IX	BANGKA BELITUNG	18,178,128,000	-	18,178,128,000
1	Dinkes Kab. Bangka	3,000,000,000	-	3,000,000,000
2	Dinkes Kab. Belitung	2,725,242,000	-	2,725,242,000
3	Dinkes Kab. Bangka Barat	4,115,000,000	-	4,115,000,000
4	Dinkes Kab. Bangka Tengah	3,575,000,000	-	3,575,000,000
5	Dinkes Kab. Bangka Selatan	3,672,886,000	-	3,672,886,000
6	Dinkes Kab. Belitung Timur	1,090,000,000	-	1,090,000,000
X	KEP RIAU	16,718,000,000	-	16,718,000,000
1	Dinkes Kab. Karimun	4,750,000,000	-	4,750,000,000
2	Dinkes Kab. Bintan	3,200,000,000	-	3,200,000,000
3	Dinkes Kab. Natuna	4,118,000,000	-	4,118,000,000
4	Dinkes Kota Batam	4,650,000,000	-	4,650,000,000
XI	DKI JAKARTA	-	-	-
XII	JAWA BARAT	12,700,000,000	-	12,700,000,000
1	Dinkes Kab. Sukabumi	4,850,000,000	-	4,850,000,000
2	Dinkes Kab. Garut	4,850,000,000	-	4,850,000,000
3	Dinkes Kab. Karawang	3,000,000,000	-	3,000,000,000
XIII	JAWA TENGAH	18,000,000,000	-	18,000,000,000
1	Dinkes Kab. Banyumas	2,500,000,000	-	2,500,000,000
2	Dinkes Kab. Banjarnegara	3,000,000,000	-	3,000,000,000
3	Dinkes Kab. Rembang	3,000,000,000	-	3,000,000,000
4	Dinkes Kab. Jepara	3,000,000,000	-	3,000,000,000
5	Dinkes Kab. Pemalang	2,000,000,000	-	2,000,000,000
6	Dinkes Kab. Tegal	2,500,000,000	-	2,500,000,000
7	Dinkes Kab. Brebes	2,000,000,000	-	2,000,000,000
8	Dinkes Kab. Klaten	-	15,000,000,000	15,000,000,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	PROVINSI KABUPATEN/KOTA	RM		ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN RUJUKAN	
1	2	3	4	5
9	RSU Salatiga	-	9,500,000,000	9,500,000,000
10	RSU Wonosobo	-	9,500,000,000	9,500,000,000
XIV	DI YOGYAKARTA	14,028,700,000	-	14,028,700,000
1	Dinkes Kab. Kulon Progo	4,290,000,000	-	4,290,000,000
2	Dinkes Kab. Gunung Kidul	2,280,000,000	-	2,280,000,000
3	Dinkes Kab. Sleman	3,958,700,000	-	3,958,700,000
4	Dinkes Kota Yogyakarta	3,500,000,000	-	3,500,000,000
XV	JAWA TIMUR	21,427,909,000	-	21,427,909,000
1	Dinkes Kab. Situbondo	4,500,000,000	-	4,500,000,000
2	Dinkes Kab. Tuban	2,500,000,000	-	2,500,000,000
3	Dinkes Kab. Gresik	3,500,000,000	-	3,500,000,000
4	Dinkes Kab. Bangkalan	4,000,000,000	-	4,000,000,000
5	Dinkes Kab. Sampang	4,700,000,000	-	4,700,000,000
6	Dinkes Kab. Pamekasan	2,227,909,000	-	2,227,909,000
7	RSUD Dr. Soegiri Lamongan	-	10,909,020,000	10,909,020,000
XVI	BANTEN	6,477,500,000	-	6,477,500,000
1	Dinkes Kab. Tangerang	3,477,500,000	-	3,477,500,000
2	Dinkes Kota Cilegon	3,000,000,000	-	3,000,000,000
XVII	BALI	10,131,100,000	63,613,000,000	73,744,100,000
1	Dinkes Kab. Jembrana	3,000,000,000	-	3,000,000,000
2	Dinkes Kab. Gianyar	816,400,000	-	816,400,000
3	Dinkes Kab. Klungkung	3,000,000,000	30,263,000,000	33,263,000,000
4	Dinkes Kab. Buleleng	3,314,700,000	33,350,000,000	36,664,700,000
XVIII	NUSA TENGGARA BARAT	27,800,000,000	-	27,800,000,000
1	Dinkes Kab. Lombok Barat	4,100,000,000	-	4,100,000,000
2	Dinkes Kab. Lombok Tengah	4,200,000,000	-	4,200,000,000
3	Dinkes Kab. Lombok Timur	4,400,000,000	-	4,400,000,000
4	Dinkes Kab. Bima	3,350,000,000	-	3,350,000,000
5	Dinkes Kab. Sumbawa Barat	3,650,000,000	-	3,650,000,000
6	Dinkes Kab. Lombok Utara	3,600,000,000	-	3,600,000,000
7	Dinkes Kota Bima	4,500,000,000	-	4,500,000,000
8	RSU Dompu	-	9,000,000,000	9,000,000,000
XIX	NUSA TENGGARA TIMUR	45,817,500,000	-	45,817,500,000
1	Dinkes Kab. Sumba Barat	3,600,000,000	-	3,600,000,000
2	Dinkes Kab. Sumba Timur	4,100,000,000	-	4,100,000,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	PROVINSI KABUPATEN/KOTA	RM		ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN RUJUKAN	
1	2	3	4	5
3	Dinkes Kab. Kupang	3,950,000,000	-	3,950,000,000
4	Dinkes Kab. Timor Tengah Utara	4,000,000,000	-	4,000,000,000
5	Dinkes Kab. Belu	4,667,500,000	-	4,667,500,000
6	Dinkes Kab. Lembata	4,100,000,000	-	4,100,000,000
7	Dinkes Kab. Sikka	4,100,000,000	-	4,100,000,000
8	Dinkes Kab. Rote Ndao	4,000,000,000	-	4,000,000,000
9	Dinkes Kab. Manggarai Barat	3,600,000,000	-	3,600,000,000
10	Dinkes Kab. Sumba Tengah	3,600,000,000	-	3,600,000,000
11	Dinkes Kab. Sumba Barat Daya	3,100,000,000	-	3,100,000,000
12	Dinkes Kab. Manggarai Timur	3,000,000,000	-	3,000,000,000
13	RSUD Alor	-	7,000,000,000	7,000,000,000
14	RS Penyangga Perbatasan Betun	-	4,000,000,000	4,000,000,000
15	RSUD Kota Kupang	-	30,000,000,000	30,000,000,000
16	RSUD Larantuka	-	10,000,000,000	10,000,000,000
XX	KALIMANTAN BARAT	32,800,000,000	-	32,800,000,000
1	Dinkes Kab. Sambas	4,800,000,000	-	4,800,000,000
2	Dinkes Kab. Bengkayang	4,450,000,000	-	4,450,000,000
3	Dinkes Kab. Pontianak	3,000,000,000	-	3,000,000,000
4	Dinkes Kab. Sanggau	4,850,000,000	-	4,850,000,000
5	Dinkes Kab. Ketapang	3,600,000,000	-	3,600,000,000
6	Dinkes Kab. Sintang	4,700,000,000	-	4,700,000,000
7	Dinkes Kab. Sekadau	3,400,000,000	-	3,400,000,000
8	Dinkes Kab. Melawi	4,000,000,000	-	4,000,000,000
XXI	KALIMANTAN TENGAH	4,300,000,000	22,648,630,000	26,948,630,000
1	Dinkes Kab. Katingan	4,300,000,000	-	4,300,000,000
2	Dinkes Kab. Kotawaringin Timur	-	22,648,630,000	22,648,630,000
XXII	KALIMANTAN SELATAN	9,015,000,000	23,299,956,000	32,314,956,000
1	Dinkes Kab. Tanah Laut	1,915,000,000	-	1,915,000,000
2	Dinkes Kab. Barito Kuala	4,100,000,000	-	4,100,000,000
3	Dinkes Kab. Hulu Sungai Utara	3,000,000,000	-	3,000,000,000
4	Dinkes Kab. Hulu Sungai Selatan	-	23,299,956,000	23,299,956,000
XXIII	KALIMANTAN TIMUR	6,807,000,000	19,000,000,000	25,807,000,000
1	Dinkes Kab. Pasir	1,483,500,000	-	1,483,500,000
2	Dinkes Kab. Kutai Timur	2,701,000,000	-	2,701,000,000
3	Dinkes Kab. Mahakam Hulu *)	2,622,500,000	-	2,622,500,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	PROVINSI KABUPATEN/KOTA	RM		ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN RUJUKAN	
1	2	3	4	5
4	RSUD Abdul Wahab Sjaharanie	-	19,000,000,000	19,000,000,000
XXIV	KALIMANTAN UTARA	12,110,536,000	-	12,110,536,000
1	Dinkes Kab. Malinau	3,310,536,000	-	3,310,536,000
2	Dinkes Kab. Bulungan	4,300,000,000	-	4,300,000,000
3	Dinkes Kab. Nunukan	4,500,000,000	-	4,500,000,000
XXV	SULAWESI UTARA	9,085,000,000	-	9,085,000,000
1	Dinkes Kab. Minahasa Utara	4,300,000,000	-	4,300,000,000
2	Dinkes Kab. Siau Tagulandang Biaro	1,800,000,000	-	1,800,000,000
3	Dinkes Kota Manado	2,985,000,000	-	2,985,000,000
XXVI	SULAWESI TENGAH	23,820,000,000	71,640,622,000	95,460,622,000
1	Dinkes Kab. Morowali	4,191,000,000	17,757,272,000	21,948,272,000
2	Dinkes Kab. Buol	3,410,000,000	-	3,410,000,000
3	Dinkes Kab. Parigi Moutong	3,786,000,000	19,716,423,000	23,502,423,000
4	Dinkes Kab. Tojo Una-una	2,996,000,000	-	2,996,000,000
5	Dinkes Kab. Sigi	3,120,000,000	-	3,120,000,000
6	Dinkes Kab. Banggai Laut *)	3,256,000,000	-	3,256,000,000
7	Dinkes Kab. Morowali Utara *)	3,061,000,000	-	3,061,000,000
8	Dinkes Kab. Banggai	-	17,684,172,000	17,684,172,000
9	Dinkes Kab. Banggai Kepulauan	-	16,482,755,000	16,482,755,000
XXVII	SULAWESI SELATAN	18,900,000,000	23,132,787,000	42,032,787,000
1	Dinkes Kab. Kepulauan Selayar	4,300,000,000	-	4,300,000,000
2	Dinkes Kab. Bulukumba	2,500,000,000	-	2,500,000,000
3	Dinkes Kab. Janeponto	2,500,000,000	-	2,500,000,000
4	Dinkes Kab. Pangkajene Kepulauan	4,600,000,000	-	4,600,000,000
5	Dinkes Kab. Luwu	2,500,000,000	-	2,500,000,000
6	Dinkes Kab. Toraja Utara	2,500,000,000	-	25,632,787,000
7	Dinkes Kab. Bone	15,000,000,000	-	15,000,000,000
8	Dinkes Kab. Wajo	15,000,000,000	-	15,000,000,000
9	Dinkes Kab. Sidrap	10,000,000,000	-	10,000,000,000
10	RSU Ajapange Soppeng	-	15,000,000,000	15,000,000,000
XXVIII	SULAWESI TENGGARA	38,232,500,000	-	38,232,500,000
1	Dinkes Kab. Buton	3,900,000,000	-	3,900,000,000
2	Dinkes Kab. Konawe	4,632,500,000	-	4,632,500,000
3	Dinkes Kab. Wakatobi	3,000,000,000	-	3,000,000,000
4	Dinkes Kab. Kolaka Utara	5,400,000,000	-	5,400,000,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	PROVINSI KABUPATEN/KOTA	RM		ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN RUJUKAN	
1	2	3	4	5
5	Dinkes Kab. Buton Utara	4,500,000,000	-	4,500,000,000
6	Dinkes Kab. Konawe Utara	3,550,000,000	-	3,550,000,000
7	Dinkes Kota Kendari	4,000,000,000	-	4,000,000,000
8	Dinkes Kota Bau-bau	4,550,000,000	-	4,550,000,000
9	Dinkes Kab. Kolaka Timur *)	4,700,000,000	-	4,700,000,000
XXIX	GORONTALO	8,804,854,000	-	8,804,854,000
1	Dinkes Kab. Boalemo	2,000,000,000	-	2,000,000,000
2	Dinkes Kab. Pohuwato	2,404,854,000	-	2,404,854,000
3	Dinkes Kab. Gorontalo Utara	4,400,000,000	-	4,400,000,000
XXX	SULAWESI BARAT	17,793,323,000	-	17,793,323,000
1	Dinkes Kab. Majene	3,743,323,000	-	3,743,323,000
2	Dinkes Kab. Polewali Mandar	4,650,000,000	-	4,650,000,000
3	Dinkes Kab. Mamuju	4,500,000,000	-	4,500,000,000
4	Dinkes Kab. Mamuju Utara	4,900,000,000	-	4,900,000,000
5	Dinkes Kab. Mamasa	14,000,000,000	-	14,000,000,000
XXXI	MALUKU	25,625,000,000	-	25,625,000,000
1	Dinkes Kab. Maluku Tenggara Barat	4,000,000,000	-	4,000,000,000
2	Dinkes Kab. Maluku Tenggara	4,625,000,000	-	4,625,000,000
3	Dinkes Kab. Maluku Tengah	4,500,000,000	-	4,500,000,000
4	Dinkes Kab. Buru	3,350,000,000	-	3,350,000,000
5	Dinkes Kab. Seram Bagian Barat	4,850,000,000	-	4,850,000,000
6	Dinkes Kab. Buru Selatan	4,300,000,000	-	4,300,000,000
XXXII	MALUKU UTARA	26,100,000,000	-	26,100,000,000
1	Dinkes Kab. Halmahera Barat	3,950,000,000	-	3,950,000,000
2	Dinkes Kab. Halmahera Tengah	4,750,000,000	-	4,750,000,000
3	Dinkes Kab. Halmahera Selatan	4,500,000,000	-	4,500,000,000
4	Dinkes Kab. Halmahera Timur	4,550,000,000	-	4,550,000,000
5	Dinkes Kota Ternate	4,300,000,000	-	4,300,000,000
6	Dinkes Kota Tidore Kepulauan	4,050,000,000	-	4,050,000,000
XXXIII	PAPUA BARAT	38,401,677,000	-	38,401,677,000
1	Dinkes Kab. Kaimana	4,500,000,000	-	4,500,000,000
2	Dinkes Kab. Teluk Wondama	4,500,000,000	-	4,500,000,000
3	Dinkes Kab. Teluk Bintuni	4,880,000,000	-	4,880,000,000
4	Dinkes Kab. Manokwari	4,521,677,000	-	4,521,677,000
5	Dinkes Kab. Sorong Selatan	4,500,000,000	-	4,500,000,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	PROVINSI KABUPATEN/KOTA	RM		ALOKASI
		PELAYANAN DASAR	PELAYANAN RUJUKAN	
1	2	3	4	5
6	Dinkes Kab. Sorong	3,500,000,000	-	3,500,000,000
7	Dinkes Kab. Raja Ampat	4,500,000,000	-	4,500,000,000
8	Dinkes Kab. Tambrauw	3,000,000,000	-	3,000,000,000
9	Dinkes Kota Sorong	4,500,000,000	-	4,500,000,000
XXXIV	PAPUA	32,439,000,000	137,290,305,000	169,729,305,000
1	RSUD Dok II Jayapura	-	21,000,000,000	21,000,000,000
2	Dinkes Kab. Jayapura	4,779,500,000	-	4,779,500,000
3	Dinkes Kab. Boven Digoel	4,500,000,000	-	4,500,000,000
4	Dinkes Kab. Sarmi	4,420,500,000	-	4,420,500,000
5	Dinkes Kab. Supiori	4,000,000,000	-	4,000,000,000
6	Dinkes Kab. Nduga	4,900,000,000	59,222,804,000	64,122,804,000
7	Dinkes Kab. Dogiyai	4,939,000,000	-	4,939,000,000
8	Dinkes Kab. Intan Jaya	4,900,000,000	57,067,501,000	61,967,501,000
	Total	718,613,177,000	512,065,518,000	1,230,678,695,000

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bappenas
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
7. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
8. Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan
9. Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
10. Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Kesehatan
11. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia